

PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TOMOHON (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON)

Tasya Vellicia Rondonuwu, Cecilia L. Kewo, Leny Evinita

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: tasyarondonuwu13@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan sampel 40 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS (Statistical Package for Social Science) 25. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan jumlah t lebih besar dari t tabel = $3,797 > 2,026$ (2) Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan jumlah t lebih besar dari t tabel = $32,904 > 2,026$ (3) Akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Tomohon sebesar 30,3%.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstract: This research aims to determine public sector accounting and performance-based budgeting on the accountability of government agency performance. This research uses a survey method with a sample of 40 respondents. The data collection techniques used in this research are questionnaires, observation and documentation. The data analysis technique uses multiple regression analysis with the help of SPSS (Statistical Package for Social Science) 25. The results of this research show (1) Public sector accounting has a significant effect on the accountability of government agency performance with a t number greater than t table = $3.797 > 2.026$ (2) Performance-based budgeting has a significant effect on the accountability of the performance of government agencies with a total t number greater than t table = $32.904 > 2.026$ (3) Public sector accounting and performance-based budgeting has a significant effect on the accountability of the performance of Tomohon city government agencies by 30,3%.

Keywords: Public Sector Accounting, Performance Based Budgeting and Performance Accountability of Government Agencies

PENDAHULUAN

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab (Bambang Pamungkas, 2012).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki pihak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah.

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Sherilia, 2012).

Sekarang ini, dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sringkali tercemrin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas. Kegemaran terhadap para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dan organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah (Bahri, 2012). Anggaran berbasis kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. (Wahdatul et al., 2016)

Fenomena yang peneliti temui di BPKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon dengan masalah yang terjadi yaitu penyerapan anggaran rendah dan banyak anggaran mengendap dan juga nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum efektif dan efisien. Sumber masalah ini dilansir dari <https://manado.tribunnews.com/2021/10/04/manado-tomohon-dan-mitra-terendah-penyerapan-anggaran>.

Seperti masalah yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu Shinta Pratiwi (2016) mengenai fenomena yang terjadi di SKPD Kota Cimahi yaitu penyerapan anggaran rendah dan banyak anggaran mengendap dan juga nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang buruk.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Urip Santoso, 2008).

Capaian kinerja organisasi memiliki tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah

Kota Tomohon. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon telah tercantum dalam Keputusan Walikota Tomohon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tomohon melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

Masalah ini dibatasi pada akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggungjawaban atas Tindakan individual atau organisasi yang telah duamanatkan. Haryanto (2008) mengatakan bahwa akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah. Sedangkan menurut Indra Bastian (2010:88) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah akuntabilitas berasal dari istilah Bahasa Inggris *Accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan atas semua aktivitas yang dilakukan.

Menurut Dubnick, akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Lebih lanjut Sri Minarti menjelaskan bahwa, Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Mckinsey dan Howard dalam Fierda menyatakan bahwa "Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak pihak.

Mardiasmo (2009) Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada penegelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasam sektor publik dan swasta.

Sementara menurut Bachtiar Arif (2009: 11) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai berikut, Akuntansi sektor publik sering disebut Akuntansi Pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengkhitisan transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas info keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan Deddi Nordiawan (2008:3).

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam system perencanaan penganggaran belanja Negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja (Kemenkeu, 2014). Menurut Indra Bastian (2006:171) pengertian anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Sedangkan menurut Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal.

Menurut Darise (2008) anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut. Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem perencanaan program yang akan dilakukan pemerintah dalam pendayagunaan anggaran yang berorientasi pada hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan rencana atau target.

Menurut Nafarin (2004) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Halim (2007) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam

pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Bappenas (2007) mengemukakan Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian Anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai.

Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawab publik (Indra Bastian, 2010).

Menurut penelitian Bambang Pamungkas (2012) dalam akuntansi sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dalam pernyataan Indra Bastian (2006:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Menurut Lembaga administrasi negara (LAN) (2003) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui beberapa faktor pendukung. Sedangkan menurut Komang Sri Endrayani, dkk (2014) dalam penelitian penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengemukakan bahwa dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja karena jika dalam melaksanakan berbasis kinerja

dengan menaati dimensi akuntabilitas tersebut, maka intansi pemerintah akan mampu menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Tomohon (BPKPD) pada SKPD Kota Tomohon. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi.

- 1) Kriteria Inklusi
 - a) Pegawai sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan program di BPKPD pada SKPD Kota Tomohon.
 - b) Pegawai sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan program di BPKPD pada SKPD Kota Tomohon yang bersedia menjadi responden.
- 2) Kriteria Eksklusi
 - a) Pegawai yang bukan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan program di BPKPD pada SKPD Kota Tomohon.
 - b) Pegawai sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan program di BPKPD pada SKPD Kota Tomohon yang menolak dijadikan responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Tabel 1. Hasil Uji Parsial

T	Sig
3,797	0,001

Sumber: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan hasil tabel 1, maka dapat dijelaskan:

- 1) Variabel X1 terhadap Y

Nilai signifikan = $0,001 < 0,05$

T hitung > ttabel = $3,707 > 2,026$

Sesuai dengan tabel 1, yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah $0,001 < 0,05$ yang artinya hasilnya lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai thitung $3,797 >$ nilai t tabel $2,026$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti terdapat pengaruh Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

- 2) Variabel X2 terhadap Y

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (t) X2

T	Sig
2,904	0,006

Sumber: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

Nilai signifikan = $0,006 < 0,05$

t hitung > t tabel = $2,904 > 2,026$

Sesuai dengan tabel diatas, yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah $0,006 < 0,05$ yang artinya hasilnya lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai t hitung $2,904 > t$ tabel $2,026$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X_2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) secara signifikan.

Hasil Uji regresi berganda

Analisis regresi berganda tujuannya digunakan untuk memastikan apakah antara variabel satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

Rumusnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2$$

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients
		B
1	(Constant)	12.677
	Akuntansi Sektor Publik	.461
	Anggaran Berbasis Kinerja	.293
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		

Sumber: Hasil Olah SPSS 25

Berdasarkan tabel 3, pada kolom Unstandardized Coefficients beta dapat disusun persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2$$

$$Y = 12,677 + 0,461 + 0,293 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi berganda di atas adalah:

- Nilai $a = 12,677$ merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Y belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) tidak mengalami perubahan.
- b_1 (nilai koefisien regresi X_1) sebesar $0,461$ menunjukkan bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik mempunyai pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Akuntansi Sektor Publik maka akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar $0,461$, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- b_2 (nilai koefisien regresi X_2) sebesar $0,293$ menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1

satuan variabel Anggaran Berbasis Kinerja maka akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,293, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan Uji T (Parsial) t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu $3,797 > 2,026$ dan pada tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu $0,001 < 0,05$, maka H_{a1} diterima. Kemudian (nilai koefisien regresi X_1) sebesar 0,461 menunjukkan bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik mempunyai pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Akuntansi Sektor Publik maka akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,461, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sehingga penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tomohon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa akuntansi sektor publik yang dilaksanakan oleh SKPD Kota Tomohon telah terlaksana dengan baik karena berdasarkan pertanyaan yang diberikan mempunyai tanggapan yang baik dari responden dengan memberikan jawaban untuk setiap indikator objektivitas, konsistensi, daya banding dan tepat waktu dengan menjawab sangat setuju, dan setuju.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SKDP Kota Tomohon membuktikan bahwa SKDP Kota Tomohon memiliki objektivitas yang baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Kemudian metode akuntansi yang digunakan oleh SKPD Kota Tomohon dalam menghasilkan laporan keuangan itu sama dari tahun ke tahun sehingga dapat diperbandingkan kinerjanya. Hal tersebut membuat SKPD Kota Tomohon konsisten dalam menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya laporan keuangan SKPD Kota Tomohon dapat diperbandingkan anatar periode waktu atau dengan instansi sejenis serta daya banding ini berkaitan dengan objektivitas karena semakin objektiv suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya. Selanjutnya laporan keuangan yang disajikan oleh instansi tepat pada waktunya sehingga dapat digunakan sebagai dsar pengambilan keputusan karena semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan dari instansi pemerintah Kota Tomohon.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana akuntansi sektor publik yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Tomohon.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan,

penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Indra Bastian, 2010).

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Pratiwi (2021) dengan judul pengaruh akuntansi sekot publik dann anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Shinta menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan jumlah thitung > ttabel = 7,176 > 2,01. Artinya akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Cimahi. Akuntansi sektor publik memberikan pengaruh sebesar 25,2% koefisien korelasi yang diperoleh antara akuntansi sekotor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan hubungan yang terjadi adalah positif searah yang artinya semakin baiknya akuntansi sekor publik akan berdampak pada semakin baiknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Cimahi.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Nurfasila (2021) dengan judul pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam mencegah fraud. Hasil penelitian Nurfasila menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar $0,017 < 0,05$ kemudian pada tabel R square sebesar 0,188 hal ini menunjukkan pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 18,8% sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara itu nilai koefisien akuntansi sekor publik sebesar 0,433 yang artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan nilai akuntansi sektor publik, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,443. Sehingga dapat dikatakan ada pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinejra instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan Uji T (Parsial) t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu $2,904 > 2,026$ dan pada tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu $0,006 < 0,05$, maka H_a2 diterima. Kemudian (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,293 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Anggaran Berbasis Kinerja, maka akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,293, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sehingga penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tomohon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh SKPD Kota Tomohon telah terlaksana dengan baik karena berdasarkan pertanyaan yang diberikan mempunyai tanggapan yang baik dari responden dengan memberikan jawaban untuk setiap indikator ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan menjawab sangat setuju, dan setuju.

Dalam satu periode anggaran, dana yang dialokasikan pada masing-masing SKPD sudah sesuai dengan posisinya masing-masing termasuk dana yang dialokasikan di bagian BPKP pada SKPD Kota Tomohon dan dana tersebut digunakan untuk membiayai program serta kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan setiap pegawai melakukan tugasnya dalam pemberian pelayanan publik secara profesional.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana anggaran berbasis kinerja yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Tomohon.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Indra Bastian, 2010). Penerapan akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui beberapa faktor pendukung (Lembaga Administrasi Negara, 2008).

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ana Muchlisa Rezeqiah (2017) dengan judul pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Ana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ serta koefisien regresi variabel anggaran berbasis kinerja menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berarti semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2019) dengan judul pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian Herlina menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 1,785 dengan nilai signifikan sebesar $0,081 < 0,05$ dari hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,171 menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maka perlu dilakukan anggaran berbasis kinerja yang baik. Karena, anggaran berbasis kinerja merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.

Hal tersebut juga sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laura Wahdatul, dkk (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian tersebut diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $12,370 > 1,9774$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bandung, artinya semakin baik

anggaran berbasis kinerja semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bandung.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga berdasarkan analisis hasil pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tomohon.
2. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tomohon.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Agar di tahun mendatang bisa ditingkatkan pengelolannya baik secara ekonomis, efisien maupun efektifitasnya sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tomohon lebih baik dalam akuntansi sektor publik.
2. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tomohon dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Muchlisa Rezeqiah. 2017. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumatera Selatan.
- Anggie Veronisa Claura. 2015 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ISSN 2355-6854.
- Agung Edy Wibowo, Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian, Edisi Ke Dua, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Agung Nugroho, 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik penelitian Dengan SPSS, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bahri Syambudi Prasetya 2012, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), Universitas Pasundan, Bandung.
- Dedi Nordiawan 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Dita Angga Rusiana. 2015. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kejagung Paling Buruk. Sindonews
- Dyah Ratih Erwan. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwi Ratmono. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: 2015.
- Gita Soraya, Rika, Cherrya. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja ISSN 1978-1520.

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi analisis dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendra Cipta. 2011. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 1, Jurnal Manajemen Kinerja. Tanah Datar.
- Haryanto. 2008. Perencanaan Dan Oenganggaran Daerah Pendekatan Kinerja. Semarang: Badan Penerbit.
- Herlina. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makasar.
[http //repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id) BAB II LANDASAN TEORITAS 2.1 Anggaran Berbasis Kinerja.
- [http //repository.stiewidyagamalumajang.ac.id](http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id) ›landasan teori akuntabilitas.
- Indra Bastian. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Indra Bastian, 2014. Audit Sektor Publik. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik Publik: Suatu Pengantar. Jakarta. Penerbit: Erlangga.
- Indra Bastian. 2013. Akuntansi Yayasan dan Sektor Publik, Erlangga. Jakarta.
- Intan Permata Haska Wina. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komang Sri Endrayani. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Volume 2 Nomor 1.
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta: Penerbit LAN
- Ririn Nur Febriani. 2015. Percepat Serapan Anggaran SKPD Diminta Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja. Pikiran Rakyat.
- Langi, Jessy, dkk. (2022). Implementasi Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Negara pada Universitas Negeri Manado. Volume 5/ Issue 2 (2022): pages 178-184.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.
- Nurfasila. 2022. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud. Kabupaten Pinrang.
- Ratmono. Dwi & Sholihin. Mahfud 92015). Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual. Cetakan pertama Upp Dtim Ykpn: Yogyakarta.
- Sherillia Septriane, Yon Nusdal. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja, Jurnal Riset Akuntansi ISSN 2086-0447.
- Shinta Pratiwi. 2016. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi.
- Srimindarti, Caecilian. 2009. Balance Scorecard Sebagai Alternative Untuk Mengukur Kinerja, Jurnal Forum Ekonomi Volume 11.
- Subana Dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Urip Santoso, 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. ISSN: 0216-1249.
- Wahdatul, L., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan

Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. EProceedings of Management, 3(2).
Yohanes Y. Subiyantoro. 2011. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas